

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan *good governance* pada Perangkat Daerah di Kota Bandung berada pada persentase sebesar 44% dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengahnya atau sebanyak 11 perangkat daerah di Kota Bandung menerapkan *good governance* dengan cukup baik dilihat dari segi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, efisien dan efektif.
2. Kualitas informasi laporan keuangan daerah pada Perangkat Daerah di Kota Bandung berada pada persentase sebesar 60% dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau sebanyak 15 perangkat daerah di Kota Bandung menyajikan informasi laporan keuangan yang cukup berkualitas dilihat dari segi relevan, andal (dapat dipercaya), dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
3. Penerapan *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah pada Perangkat Daerah Kota Bandung. Hasil penelitian positif yang berarti bahwa semakin baik penerapan *good governance* maka semakin baik kualitas informasi laporan keuangan yang disajikan oleh Perangkat Daerah Kota Bandung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan, adapun saran yang dapat dikemukakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. *Good governance* diterapkan dalam sistem pemerintahan agar pemerintah terindar dari segala bentuk kecurangan sehingga tercipta tata

kelola pemerintah yang baik sesuai harapan masyarakat. Untuk meningkatkan penerapan *good governance* agar mencapai informasi laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah sebaiknya memaksimalkan kinerja berpedoman dengan Standar Akuntansi Pemerintah serta memaksimalkan pertanggungjawaban (akuntabilitas), keterbukaan informasi (transparansi), partisipasi, keadilan, efektivitas dan efisien dalam pengelolaan keuangan maupun aktivitas lain dalam pemerintah.

2. Untuk meningkatkan *good governance*, pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Daerah sebaiknya terbuka dan bertanggungjawab dengan baik kepada masyarakat maupun investor atas hasil kinerja didalam pemerintah. Dengan cara meningkatkan kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi laporan keuangan seperti penyajian informasi laporan keuangan dalam website dengan lengkap, serta mengikutsertakan masyarakat dalam beberapa program pemerintah. Tingkat transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintah sangat penting untuk menghasilkan informasi yang berkualitas bagi masyarakat maupun investor ataupun pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Agar informasi laporan keuangan daerah berkualitas disarankan pemerintah dalam mengelola dana daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah dan lebih teliti dalam penyajian laporan keuangan agar tidak terjadi salah saji di beberapa pos. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dengan ditandai opini WTP dan sesuai dengan target opini yang ada dalam RPJMD.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti bidang yang sama, sebaiknya perlu dikaji kembali variabel yang terdapat dalam penelitian ini karena masih banyak terdapat kekurangan, seperti menambah variabel yang digunakan dalam penelitian sehingga penelitian akan lebih kompleks dan fokus pada permasalahan *good governance*.

Rofingah Dewi Kuswati, 2019
**PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN DAERAH (Kasus Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Bandung)**
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu